**PERAN MEDIASI SEBAGAI UPAYA PERDAMAIAN DALAM MENGATASI
PERCERAIAN OLEH PENGADILAN AGAMA**

Dina Prihastuti¹, Aisyah Resta Melati S², Nadia Ardine³

¹²³Hukum, Universitas Tidar, Magelang, Indonesia

dinaprihastuti23@gmail.com, resta.melati23@gmail.com, nadiaardine@gmail.com

Abstract

Marriage is a human need in order to continue offspring. This is regulated in article 1 of Law no. 1 of 1974 concerning Marriage. Marriage has the aim of building a household or family that is sakinah, mawadah and warahmah. However, not all marriages can run well, because household problems often occur that cannot be resolved until the end result is divorce. Divorce cases will initially be resolved through mediation, or involve the role of a third party (mediator) in resolving problems that occur between the first party and the second party. Divorce settlement through mediation has benefits, because the parties can reach a decision that they feel is fair to them. Mediation also aims to be an effort to reunite the relationship between husband and wife who have been registered with the religious court for the divorce process, so that the divorce can be annulled. Mediation carried out in religious courts is regulated in PERMA No. 1 of 2008 concerning mediation and PERMA No. 1 of 2016 concerning Mediation Procedures in Court. At the mediation stage in religious courts, there are three stages, including the pre-mediation stage, the mediation implementation stage, and the final stage of implementing the mediation results. These three stages must be carried out so that the mediation runs smoothly and for both parties having a dispute to get a satisfactory final result.

Keywords: Divorce, religious courts, mediation

Abstrak.

Perkawinan adalah sebuah kebutuhan manusia guna meneruskan keturunan. Hal ini diatur dalam pasal 1 UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Tujuan dari perkawinan guna membangun suatu rumah tangga atau keluarga yang sakinah, mawadah, dan warahmah. Namun, tak semua perkawinan dapat berjalan dengan baik, dikarenakan sering terjadinya masalah rumah tangga yang tak dapat diselesaikan hingga jalan akhirnya adalah perceraian. Perkara perceraian awalnya akan diselesaikan secara mediasi, atau melibatkan peran pihak ketiga (mediator) dalam penyelesaian masalah yang terjadi antara kedua belah pihak yang bersengketa. Penyelesaian perceraian melalui mediasi memiliki manfaat, karena para pihak diharapkan mendapat kesepakatan yang dirasa adil bagi mereka. Mediasi pun bertujuan sebagai upaya untuk menyatukan kembali hubungan suami istri yang telah didaftarkan di pengadilan agama untuk dilakukannya proses perceraian, agar perceraian tersebut dapat dibatalkan. Mediasi yang dilaksanakan di pengadilan agama diatur dalam PERMA No. 1 Tahun 2008 tentang mediasi dan PERMA No. 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan. Mediasi sendiri terdapat tiga tahapan diantaranya tahap pra mediasi, tahap pelaksanaan mediasi, serta tahap akhir implementasi hasil mediasi. Ketiga tahap tersebut harus dilakukan guna mediasi berjalan lancar serta bagi kedua belah pihak yang memiliki sengketa dapat mendapatkan hasil akhir yang memuaskan.

Kata kunci: Perceraian, Pengadilan agama, Mediasi

1. Pendahuluan

Manusia sebagai makhluk sosial tentu memerlukan pertolongan orang lain guna memenuhi kebutuhan hidupnya. Salah satu kebutuhannya adalah melanjutkan keturunan dengan cara perkawinan. Hal tersebut tidak terlepas dari ketentuan Allah SWT yaitu menciptakan manusia dengan berpasang-pasang. Dalam pasal 1 UU No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, yang dimaksud Dalam perkawinan yaitu ikaatan antara seorang laki-laki dan seorang Perempuan yang bertujuan untuk membangun keluarga. Perkawinan dalam perspektif pasal 2 Kompilasi Hukum Islam (KHI) merupakan pernikahan yang terjadi karena akad yang sangat kuat dan taat kepada perintah Allah serta sebagai suatu ibadah, hal ini tercantum pada Al-Qur'an surah An-Nisa ayat 21.

Perkawinan dianggap ideal serta sesuai tujuan adalah perkawinan yang sakinah, mawadah dan warahmah. Dengan kata lain perkawinan yang memiliki ketentraman, berdasarkan pada perasaan cinta dan kasih sayang. Ketika membangun rumah tangga masih terdapat permasalahan yang timbul yang berujung pada perceraian. Jumlah perceraian di Indonesia cenderung tinggi, dikutip dari Parawansa (Menteri Sosial RI) pada tahun 2016 daerah yang terdapat kasus perceraian paling tinggi adalah Jawa Timur. Berdasarkan laporan statistik Indonesia dalam kurun waktu tahun 2022 di Indonesia angka kasus perceraian mencapai 516.334 kasus. Jumlah ini mengalami peningkatan dibandingkan ketika tahun 2021 sejumlah 15,31% yaitu sejumlah 447.743 kasus.

Faktor meningkatnya kasus perceraian di Indonesia disebabkan karena faktor ekonomi, terdapat pihak yang meninggalkan, kekerasan dalam rumah tangga, dan poligami. Untuk mengurangi adanya kasus perceraian yang kian melonjak,

pengadilan agama memberikan bantuan berupa mediasi. Sesuai pada prinsip yang digunakan oleh UU Perkawinan, salah satunya dengan mempersulit perceraian yang diatur dalam pasal 39 ayat (1) dan (2) UU Perkawinan. Dapat dilakukannya perceraian ketika kedua belah pihak tidak dapat didamaikan serta harus ada alasan mendasar bahwa keduanya sudah tidak bisa lagi hidup rukun.

2. Tinjauan Pustaka

Secara etimologi, kata mediasi berasal dari Bahasa Latin *mediare* yang mempunyai arti berada di tengah. Arti *mediare* merupakan suatu peran saat melakukan mediasi yaitu sebagai pihak ketiga atau mediator. Dimana mediator mempunyai fungsi sebagai pihak penengah dalam suatu penyelesaian sengketa serta harus berpihak adil dan sama terhadap kedua belah pihak agar menumbuhkan kepercayaan sehingga suatu kesepakatan akan tercapai. Pengertian mediasi dalam KBBI berarti ikut sertanya pihak ketiga pada sengketa dan berperan sebagai penasihat, terkandung 3 unsur penting dalam mediasi, yaitu menyelesaikan sengketa antara 2 pihak atau lebih, pihak yang menjadi mediator merupakan pihak luar dari pihak-pihak yang bersengketa, mediator hanya bertindak menjadi penasihat tanpa mempunyai wewenang untuk pengambilan Keputusan.

Garry Goopaster mendefinisikan mediasi sebagai suatu langkah negosiasi pemecahan suatu sengketa yang mana pihak ekstern tidak bersekongkol atau memihak antara pihak-pihak yang memiliki sengketa guna membantu dalam mendapatkan perjanjian yang disepakati dan diinginkan oleh masing-masing pihak. Perma no 1 tahun 2016 menyebutkan jika mediasi adalah tata cara menyelesaikan sengketa melalui jalan damai, secara efektif, serta mampu membuka kesempatan yang lebih besar untuk memperoleh kesepakatan yang puas serta berlandaskan keadilan.

3. Metodologi

Metode penelitian yang digunakan pada penulisan ini yaitu normatif empiris. Metode penelitian normatif empiris mengkaji fenomena, fakta, dan permasalahan hukum dalam kaitannya dengan norma dan peraturan hukum yang ada. Data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini berasal dari *literatur review* atau studi kepustakaan.

4. Pembahasan

1. Peran Mediasi Dalam Perkara Perceraian di Indonesia

Istilah kata “mediasi” diambil dari Bahasa latin “mediare” yang memiliki makna ditengah. Istilah ini mengacu pada peran pihak ketiga dalam menyelesaikan perselisihan yang timbul antara pihak pertama dan kedua. Pihak ketiga atau pihak tengah biasa disebut dengan mediator. Saat situasi ini, mediator harus mampu memahami kekhawatiran pihak-pihak yang terlibat secara imparial dan lugas, bertindak adil dan setara agar dapat menumbuhkan rasa kepercayaan bagi orang yang sedang berseketika. Menurut *Collins English Dictionary and Thesaurus*, mediasi merupakan proses yang digunakan untuk membantu persengketaan antara dua orang atau lebih sehingga mencapai penyelesaiankesepakatan. Selama proses mediasi, mediator bertindak sebagai perantara dan mencari pengganti atau alternatif dalam menyelesaikan sengketa. Mediator perlu memiliki kemampuan untuk membantu pihak-pihak untuk mencapai kesepakatan dan menyelesaikan perselisihan hingga mencapai titik perdamaian.

Penyelesaian suatu perselisihan yang dilakukan oleh pihak ketiga sebagai penasihat terdapat tiga hal penting di dalamnya, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, tiga hal tersebut yaitu proses penyelesaian antara kedua belah pihak yang bersengketa, pihak-pihak yang terlibat dalam proses penyelesaian sebagai mediator adalah pihak eksternal, dan pihak eksternal tersebut tidak berwenang dalam pengambilan keputusan melainkan hanya sebagai penasihat guna menyelesaikan sengketa.

Dilakukannya mediasi bertujuan untuk menyelesaikan permasalahan dengan dilibatkannya pihak penengah sehingga bersifat netral dan imparial. Dalam mediasi kedua belah pihak yang bersengketa mempunyai hak yang sama untuk menentukan keputusan, sedangkan mediator tidak berwenang dalam mengambil keputusan karena mediator hanya menjembatani para pihak yang bersengketa mencapai kesepakatan. Manfaat yang dirasakan dalam menyelesaikan sengketa dengan mediasi sangat menguntungkan masing-masing pihak karena para pihak dapat mencapai keputusan yang dirasa adil oleh mereka. Ketika mediasi gagal pun tetap memiliki manfaat, karena para pihak saling bertemu dan mengklarifikasi akar permasalahan serta meminimalisir kesalahpahaman dan mempersempit perselisihan. Hal tersebut menunjukkan bahwa jika kedua belah pihak menyatakan ingin melakukan mediasi maka hal tersebut menunjukkan bahwa terdapat keinginan antara kedua belah pihak guna menyelesaikan sengketa nya, tetapi belum mendapatkan titik temu saja. Mediasi sebetulnya merupakan hal yang cukup susah dilaksanakan, namun tidak berarti hal tersebut tidak mampu dilaksanakan sesuai harapan, salah satunya dalam perselisihan rumah tangga yang berakhir dengan tahap perceraian.

Dilakukannya mediasi dalam upaya menyatukan kembali hubungan suami istri yang telah didaftarkan di pengadilan agama untuk dilakukannya proses perceraian sebetulnya mempunyai beberapa faktor yang melatarbelakanginya *pertama*, mediasi sebagai alternatif penyelesaian, dengan dilakukannya mediasi maka penyelesaian sengketa dapat lebih ringan serta dapat memberikan kesempatan bagi pasangan suami istri tersebut untuk mencari solusi dengan jalan damai yang lebih mudah tanpa harus melalui tahapan pengadilan yang lumayan menyita waktu yang lama dan biaya perceraian yang cenderung mahal. *Kedua*, mendorong komunikasi antara kedua belah pihak, mediator akan membantu kedua belah pihak guna membicarakan hal-hal yang perlu diperhatikan jika terjadi perceraian seperti harta gono gini, hak asuh anak serta finansial agar dipertimbangkan kembali serta diharapkan dapat mengurangi konflik. *Ketiga*, mencari solusi bersama terhadap permasalahan utama yg menjadi faktor mereka ingin bercerai, pada hal ini mediator perlu bersikap adil dan netral, sehingga kedua pihak tersebut mempunyai kewenangan penuh terhadap keputusannya daripada jika keputusan tersebut diputuskan oleh hakim, dengan begitu maka dapat tercapai solusi yang lebih sesuai dengan keadaan mereka. *Keempat*, perlindungan terhadap anak dapat dibicarakan melalui mediasi seperti hak asuh, nafkah anak, serta hak-hak anak yang harus mereka penuhi, sehingga memungkinkan pasangan tersebut untuk mencapai kesepakatan yang lebih baik untuk kesejahteraan hidup anak-anak mereka. *Kelima*, banyak pasangan yang setelah bercerai konflik diantara mereka masih terjadi, dengan adanya mediasi diharapkan konflik yang tengah terjadi antara kedua belah pihak telah dapat tercapai kata damai sebelum putusan perceraian.

2. Peran Pengadilan Agama Dalam Proses Mediasi Setelah Berlakunya PERMA Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan

Mediasi di dalam Pengadilan Agama merupakan sebuah cara yang bertujuan untuk memutuskan sengketa melalui negosiasi atau perundingan dengan mediator sebagai pihak yang membantu demi mendapatkan kata sepakat antar para pihak. Mediator di sini sebagai hakim maupun pihak lain yang telah memenuhi syarat yaitu mempunyai sertifikat mediator. Mediator merupakan pihak netral atau pihak penengah yang membantu pihak yang bersangkutan pada proses perundingan serta menemukan cara menyelesaikan sengketa dengan tidak memaksakan sebuah penyelesaian. Mediasi yang dijalankan oleh pengadilan terbuti mengalami perkembangan dengan adanya pembaharuan peraturan mahkamah agung tersebut.

Terdapat tiga tahapan dalam proses mediasi, yaitu:

1. Tahap Pra Mediasi

Tahap pertama yaitu tahap pra mediasi dimana dalam tahap ini wajib dilakukan oleh hakim pemeriksa serta melakukan panggilan secara patut untuk kedua pihak. Apabila terdapat pihak yang tak hadir dalam sidang pertama, pihak tersebut akan dipanggil sekali lagi. Tahapan mediasi yaitu 30 hari serta diperpanjang 30 hari berikutnya apabila para pihak menghendaki.

2. Tahap Pelaksanaan Mediasi

Dalam tahap pelaksanaan mediasi, mediator serta para pihak diharuskan benar-benar serius ketika menjalankan tahapan mediasi guna mediasi dapat berhasil.

3. Tahap Akhir Implementasi Hasil Mediasi

Tahap akhir pelaksanaan hasil mediasi harus berbentuk tertulis dengan ditandatangani oleh mediator serta para pihak, selanjutnya para pihak memberikan laporan hasil mediasi kepada hakim pemeriksa perkara. Apabila berhasilnya mediasi, lalu hakim yang memeriksa perkara menerbitkan akta perdamaian, tetapi jika hasil yang diinginkan tidak tercapai maka proses persidangan bisa dilanjutkan

Penerapan mediasi dalam lingkup pengadilan memperlihatkan PERMA mediasi memiliki peran penting sebagai upaya untuk penyelesaian sengketa (bukan memutus perkara). Tujuan dari PERMA No. 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, yaitu:

1. Dalam proses mediasi, para pihak tentu menginginkan sengketa diselesaikan secara lebih cepat dan murah. Oleh karena itu, mediasi mempunyai tujuan mewujudkan harapan pihak bersengketa
2. Mediasi membuka peluang yang lebih besar kepada pihak-pihak yang memiliki sengketa guna turut andil dalam penemuan solusi yang menguntungkan bagi semua pihak.
3. Mediasi dapat menguatkan serta mengoptimalkan fungsi dari lembaga pengadilan pada saat penyelesaian sengketa secara non-adjudikatif.

4. Harapan mediasi agar dapat meminimalisir tumpukan perkara di pengadilan.

Mediasi pada persoalan perceraian termasuk hal yang menarik, sebab perkara di Pengadilan Agama yang menduduki peringkat tertinggi biasanya adalah perkara perceraian. Hal tersebut terjadi hampir di semua Pengadilan Agama yang terdapat di Indonesia. Perkara perdata yaitu perceraian adalah persoalan yang perlu terlebih dahulu diselesaikan dengan proses mediasi terlebih apabila suatu putusan pengadilan tanpa sebelumnya melewati proses mediasi maka putusan tersebut batal demi hukum. Dalam melakukan mediasi, Pengadilan Agama wajib melakukan mediasi berdasarkan pada PERMA No 1 Tahun 2016. Dalam mediasi pada perkara perceraian, terdapat kemungkinan yang dapat timbul, seperti salah satu pihak tidak hadir dalam persidangan, sehingga mediasi tidak dapat dilakukan, lalu hakim memutus perkara secara verstek, serta penggugat dan tergugat dapat didamaikan oleh mediator sehingga tidak terjadinya perceraian. Maka, perkara ditarik kembali melalui Penetapan di mana penetapan merupakan produk hakim.

Apabila mediator dapat mendamaikan Penggugat dan Tergugat, sehingga perdamaian keduanya berakhir dengan perceraian yang damai, maka mediasi gagal dan pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pemeriksaan pokok perkara Dimana hal tersebut sangat penting. Hal tersebut tertulis dalam Pasal 6 ayat (1) PERMA no. 1 Tahun 2016 yang menyatakan para pihak wajib dala mengahdiri mediasi seorang diri ataupun dengan kuasa hukumnya. Hal tersebut secara eksplisit mewajibkan para pihak untuk hadir. Berbeda dengan peraturan yang sebelumnya, Dimana para pihak tidak wajib untuk hadir. Dengan adanya perbedaan peraturan tersebut maka yang diberlakukan Kembali yaitu peraturan yang lama dengan para pihak tidak wajib untuk hadir.

PERMA Nomor 1 Tahun 2016 menjelaskan jika ketidak hadiran pihak maka pihak tersebut dianggap tidak beritikad baik dalam melakukan mediasi. Terhadap penggugat disebutkan mempunyai itikad yang tidak baik pada saat melakukan proses mediasi, dengan demikian, hakim yang memeriksa perkara menyatakan bahwa gugatan penggugat tidak dapat dikabulkan serta menanggung biaya mediasi dirinya sebagai penggugat. Dalam pasal 23 disebutkan bahwa tergugat beritikad baik dalam melaksanakan mediasi apabila gugatan dimenangkan oleh penggugat, sehingga biaya mediasi ditanggung oleh tergugat. Namun saat kedua pihak baik tergugat maupun penggugat dinyatakan tidak beritikad baik maka dinyatakan gugatan tidak diterima. Untuk pemeriksaan perkara tanpa dikenakan denda diatur dalam pasal 22 dan 23, Dimana hakim mediator dan pengadilan agama saat tahapan mediasi pihak yang tidak beritikad baik menanggung biaya pemanggilan sedangkan biaya perkara ditanggung oleh penggugat.

PERMA No. 1 Tahun 2016 mengubah lamanya durasi mediasi dari 40 hari dan secara bertahap mengubahnya menjadi 30 hari. Hal tersebut telah ditetapkan dalam pasal 24 ayat 2 dan 3 yang menyebutkan proses mediasi dihitung dari tanggal perintah mediasi hingga 30 hari kemudian, namun jangka waktu tersebut dapat diperpanjang 30 hari lagi setelah jangka waktu sebelumnya berakhir.

Kesimpulan

Mediasi merupakan alternatif yang diupayakan untuk menengahi atau mencegah adanya perceraian. Dengan adanya proses mediasi dalam menemukan solusi bagi pasangan yang akan melakukan perceraian. Ketika tahapan tersebut juga dapat membicarakan berkaitan dengan harta bersama yang dimiliki dan hak asuh anak sebelum mengajukan ke Pengadilan Negeri maupun Pengadilan Agama.

Dengan dikeluarkannya PERMA No. 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan memberikan kemudahan bagi para pasangan yang hendak bercerai untuk melaksanakan mediasi terlebih dahulu yang bertujuan untuk menyelesaikan permasalahan dengan cepat dan murah, memberikan solusi yang menguntungkan bagi para pihak dan meminimalisir perkara yang menumpuk di pengadilan. Hal tersebut dimaksudkan untuk memaksimalkan adanya komunikasi yang intensif oleh pasangan yang hendak bercerai agar mendapatkan solusi terbaik dalam perkara perceraian.

Daftar Referensi

JURNAL

- Antasari, R. (2013). Pelaksanaan mediasi dalam sistem peradilan agama (kajian implementasi mediasi dalam penyelesaian perkara di pengadilan agama kelas ia Palembang). *Intizar*, 19(1), 147-162.
- Handayani, F., & Syafliwari, S. (2017). Implementasi Mediasi dalam Penyelesaian Perkara Perceraian di Pengadilan Agama. *Jurnal Al Himayah*, 1(2), 227-250.
- Rahmawati, E. S. (2016). Implikasi Mediasi Bagi Para Pihak yang Berperkara di Pengadilan Agama Malang. *De Jure: Jurnal Hukum dan Syar'iah*, 8(1), 1-14.
- Saifullah, M. (2015). Efektivitas mediasi dalam penyelesaian perkara perceraian di pengadilan agama Jawa Tengah. *Al-Ahkam*, 25(2), 181-204.

- Sidiq, A. F. (2019). Upaya Perdamaian Proses Perceraian Melalui Mediasi Oleh Pengadilan Agama Sebagai Family Counseling. *Jurnal Kajian Perempuan dan Keislaman Vol 12 No. 1, April*.
- Sofiani, T. (2010). Efektivitas Mediasi Perkara Perceraian Pasca PERMA Nomor 1 Tahun 2008 di Pengadilan Agama. *Jurnal Penelitian Vol 7 No. 2, November*.
- Syaflihar, F. H. (2017). Implementasi Mediasi dalam Penyelesaian Perkara Perceraian di Pengadilan Agama. *Jurnal Al-Himayah Vol 1 No. 2 Oktober*.
- Saifullah, M. (2015). Efektivitas Mediasi Dalam Penyelesaian Perkara Perceraian Di Pengadilan Agama Jawa Tengah. *Jurnal Al-Ahkam Vol 25 No. 2 Oktober*.

ARTIKEL ONLINE

- Cindy Mutia Annur, 2023. *Kasus Perceraian di Indonesia Melonjak Lagi Pada 2022, Tertinggi dalam Enam Tahun Terakhir*. Katadata.co.id.
<https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2023/03/01/kasus-perceraian-di-indonesia-melonjak-lagi-pada-2022-tertinggi-dalam-enam-tahun-terakhir>
diakses 27 September 2023
- Pengadilan Agama Demak, 2019. *Tentang Mediasi*. <https://pa-demak.go.id/layanan-hukum/mediasi/tentang-mediasi#:~:text=Mediasi%20di%20Pengadilan%20Agama%20adalah,Pihak%20dengan%20dibantu%20oleh%20Mediator> diakses 27 September 2023
- Rumadan Ismail, 2017. *Efektivitas Pelaksanaan Mediasi di Pengadilan Negeri*.
<https://bldk.mahkamahagung.go.id/id/component/k2/item/5-efektivitas-pelaksanaan-mediasi-di-pengadilan-negeri.html> diakses 27 September 2023

Pengadilan Agama Pasarwajo, 2020. *Akibat Hukum Pihak Yang Tidak Beritikad Baik*

Dalam Mediasi. <https://pa-pasarwajo.go.id/artikel-pengadilan/283-akibat-hukum-pihak-yang-tidak-beriktikad-baik-dalam-mediasi> diakses 28

September 2023